

# **ECOTOURISM PADA TINGKAT KOMUNITAS DI KAWASAN WISATA PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Eko Budi Santoso**

Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri,  
Jln. Sukarno Km 20 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat  
ekobs1@gmail.com

## **Abstrak**

Pengembangan suatu kawasan wisata khususnya wisata alam seringkali disebut ekowisata (*ecotourism*), walaupun belum tentu dikembangkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *ecotourism*. Tullisan ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip *ecotourism* pada kawasan wisata pada tingkat komunitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan prinsip-prinsip pengembangan kawasan wisata dengan konsep *ecotourism* dan pemecahan berbagai persoalan/hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian kualitatif deksriptif eksploratif, dengan lokus kawasan wisata Pangandaran yang memiliki keragaman daya tarik wisata alamnya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dengan sampling informan secara purposive, teknik observasi, dan dokumentasi pada berbagai data sekunder terkait. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dari 9 (sembilan) prinsip *ecotourism* secara umum penerapannya pada level komunitas di kawasan wisata Pangandaran, telah dilakukan tetapi tidak semuanya dilakukan dengan baik (kategori cukup/sedang) dengan kecenderungan kearah lebih baik. Prinsip ke-6 menurut TIES (2015) yang mengkaitkan dengan adanya peningkatan sensitivitas bagi politik negara, tidak banyak terwujud atau terlalu jauh hubungannya dengan kegiatan *ecotourism* pada level komunitas, sedangkan prinsip partisipasi sudah banyak dilakukan di lokasi penelitian tetapi tidak masuk dalam prinsip *ecotourism* menurut TIES (2015). Dari penelitian ini disarankan: 1) peningkatan alokasi bantuan dana *ecotourism* pada komunitas; 2) perlu keseimbangan manfaat kepada wisatawan dan komunitas/masyarakat lokal; 3) pembatasan prinsip ke-6 TIES (2015) sampai pada peningkatan sensitivitas pada lingkungan fisik dan sosial; dan 4) memasukkan partisipasi sebagai prinsip *ecotourism* secara universal yang dapat diadopsi oleh TIES maupun masyarakat dunia dalam pengembangan *ecotourism*.

**Kata kunci:** kawasan wisata, Pangandaran

## **PENDAHULUAN**

Pada akhir dekade 1970an, gagasan *ecotourism* atau ekowisata mulai diperbincangkan dan dianggap sebagai suatu alternatif pengembangan dari kegiatan wisata tradisional. Dan pada tahun 1980-an beberapa lembaga dunia, peneliti,

pencinta lingkungan, maupun ahli-ahli di bidang pariwisata serta beberapa negara mulai mencoba merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan serupa dengan caranya masing-masing. Rumusan ekowisata (*ecotourism*) sendiri pernah dirumuskan secara formal oleh Hector

Ceballos-Lascurain pada tahun 1984. Dia mendefinisikan Ekowisata sebagai suatu perjalanan ke tempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari untuk tujuan mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, flora dan fauna, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini. Tetapi bagi kebanyakan orang, terutama menurut orang-orang yang termasuk sebagai pencinta lingkungan, definisi ekowisata yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain tersebut belum cukup untuk menggambarkan dan menerangkan kegiatan ekowisata (*ecotourism*) secara lengkap. Penjelasan di atas dianggap hanyalah penggambaran dari kegiatan wisata alam biasa.

Pada tahun 1990, definisi ekowisata atau *ecotourism* menurut Hector ini, kemudian disempurnakan oleh Masyarakat Ekowisata Internasional (*The International Ecotourism Society* yang kemudian disingkat TIES), yang mendefinisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab yang menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Pada bulan Januari 2015, di Washington DC, TIES telah merevisi definisi dan prinsip-prinsip dari apa yang disebut sebagai *ecotourism* yang merupakan pengembangan dari rumusan tahun 1990. Dalam rumusan baru ini, TIES melakukan perubahan dan penambahan sedikit dari rumusan sebelumnya (tahun 1990) untuk memperjelas atau melengkapi yang kurang, menghilangkan ambiguitas, dan mengurangi keraguan interpretasi dalam praktik oleh industri wisata.

Menteri Dalam Negeri pada tahun 2009 juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah yang di dalamnya juga mendefinisikan tentang ekowisata, prinsip-prinsip pengembangan ekowisata di daerah maupun pengaturan lainnya terkait pengembangan ekowisata di daerah. Dalam peraturan ini juga dinyatakan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata sebagai indikator pengembangan kawasan wisata dengan pendekatan *ecotourism*.

Dalam praktek pengembangan kawasan wisata, berbagai wisata alam telah lama dikembangkan di seluruh dunia termasuk Indonesia, namun tidak semuanya dikembangkan dengan konsep *ecotourism*. Bahkan suatu kawasan wisata yang diklaim dikembangkan dengan konsep *ecotourism*, namun belum tentu tepat disebut sebagai suatu kawasan wisata yang dikembangkan dengan konsep *ecotourism*. Hal ini tergantung dari seberapa besar prinsip-prinsip *ecotourism* dijalankan atau dilaksanakan pada kawasan wisata tersebut. Hal ini juga terjadi dalam pengembangan wisata alam pada umumnya di Indonesia.

Kabupaten Pangandaran adalah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak kawasan wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat. Dari banyak kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran tersebut, sebagian besar adalah kawasan wisata yang mendasarkan pada daya tarik alam (*nature resources tourism*). Dengan demikian pengembangan wisata dengan konsep *ecotourism* sangat potensial diterapkan di kawasan-kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran ini. Namun bagaimana penerapan konsep *ecotourism* di Kabupaten Pangandaran

beserta permasalahan-permasalahan yang dihadapi memiliki kemungkinan berbeda dengan di daerah lainnya.

Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran juga tidak terlepas dari berbagai masalah, termasuk masalah lingkungan yang menjadi aspek penting dalam pengembangan *ecotourism*. Salah satu persoalan yang dialami di berbagai kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan pengembangan *ecotourism* atau ekowisata adalah persoalan sampah. Persoalan sampah di Pangandaran ini seringkali mencuat di berbagai media. Salah satu berita yang muncul pada awal tahun 2016 sebagaimana diterbitkan oleh media online [www.harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com) menyebutkan tentang persoalan sampah setelah perayaan akhir tahun 2015. Hal ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diberitakan pada media online [lifestyle.okezone.com](http://lifestyle.okezone.com) yang ditayangkan pada hari Kamis, 24 Mei 2012. Dari berita tersebut terutama dari kondisi yang menggambarkan tumpukan sampah di sepanjang kawasan pantai Pangandaran dapat dilihat bahwa tumpukan sampah tersebut sangat tidak ramah lingkungan yang apabila tidak diurus akan mengotori laut maupun menjadi sumber penyakit bagi masyarakat setempat maupun bagi wisatawan yang datang ke kawasan pada masa berikutnya.

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian yang difokuskan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip *ecotourism* dan hambatan yang ada dalam penerapan *ecotourism* pada tingkat komunitas pada kawasan wisata Pangandaran. Lokus penelitiannya dipilih kawasan wisata yang ada di dalam

Kecamatan Pangandaran. Hal ini karena di dalam Kecamatan Pangandaran ini terdapat kawasan wisata pantai barat pangandaran, kawasan wisata pantai timur pangandaran, dan kawasan wisata cagar alam Pananjung. Di dalam kecamatan ini berbagai penyelenggaraan kegiatan pariwisata maupun berbagai permasalahan dan tindak lanjutnya memiliki kemungkinan yang lebih beragam dibanding di daerah lain di Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian diharapkan memiliki kontribusi dalam pengembangan prinsip-prinsip *ecotourism* terutama pada aspek yang terkait dengan komunitas yang merupakan bagian dari masyarakat lokal di kawasan wisata yang dikembangkan dengan *ecotourism*, sehingga dapat lebih mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## LANDASAN TEORETIS DAN NORMATIF

Definisi *ecotourism* yang kemudian banyak disitir oleh pakar-pakar *ecotourism* adalah definisi menurut *The International Ecotourism Society* atau disingkat TIES (2015), yang mengkonsepsikan *ecotourism* sebagai:

*“... responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people and involves interpretation and education” with the specification that education is to staff and guests (TIES, 2015).*

Berdasarkan konsepsi tersebut, TIES (2015) merumuskan beberapa prinsip *ecotourism* sebagai berikut: 1) meminimumkan dampak fisik, sosial, perilaku dan psikologis; 2) membangun kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan dan budaya; 3) memberikan

pengalaman positif baik bagi wisatawan atau tamu maupun masyarakat lokalnya; 4) memberikan keuntungan finansial langsung untuk upaya konservasi; 5) menghasilkan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal maupun swasta pelaku industri wisata; 6) memberikan pengalaman interpretatif yang berkesan bagi wisatawan, yang membantu meningkatkan sensitivitas bagi politik negara lokasi ekowisata, maupun lingkungan dan iklim sosialnya; 7) merancang, dan mengkonstruksi atau membangun, serta mengoperasikan fasilitas yang memiliki dampak rendah (bagi lingkungan dan masyarakat lokal); 8) memberikan pengakuan terhadap hak dan kepercayaan spiritual dari masyarakat asli dan dilakukan partnersip atau kerjasama dengan masyarakat lokal untuk memberdayakan mereka.

Dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa prinsip pengembangan ekowisata di daerah di Indonesia, adalah sebagai berikut: 1) kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; 2) konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata; 3) ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; 4) edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; 4) memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; 5)

partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan 6) menampung kearifan lokal.

Sedangkan pengertian komunitas yang digunakan dalam penelitian ini relatif merupakan pengertian komunitas yang tradisional, sebagaimana dinyatakan oleh Menurut George Hillery Jr. dan menurut Fairi (1980) dalam Nasdian (2003). Menurut George Hillery Jr, komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, memiliki ikatan saling berbagai, dan memiliki hubungan untuk berinteraksi dengan satu sama lain (people living within a specific area, sharing common ties, and interacting with one another”). Sedangkan menurut Fairi (1980), komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama, dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan komunitas dalam penelitian ini adalah merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan dalam aspek pengembangan kepariwisataan di kawasan wisata Pangandaran. Di dalam pengertian ini tercakup semua orang yang merupakan pelaku penyedia barang ataupun jasa terkait dengan kegiatan kepariwisataan di kawasan wisata Pangandaran, yang tinggalnya juga di dalam kawasan wisata Pangandaran.

Oleh karena itu komunitas dapat berada pada wilayah yang sama secara nyata atau dalam ruang fungsional. Dalam hal ini kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.

## **METODA**

Penelitian ini, lebih merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi secara mendalam pemenuhan atau penerapan prinsip-prinsip *ecotourism* yang dilaksanakan di kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada tingkat komunitas. Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berusaha memahami makna dibalik data atau fakta yang nampak, serta untuk pengembangan teori terkait prinsip-prinsip *ecotourism* (Sugiyono, 2010). Pemaknaan atas fakta yang ada dikaitkan dengan prinsip-prinsip *ecotourism* yang dipakai dalam penelitian ini.

Wilayah penelitian dibatasi hanya pada kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran, karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang di dalamnya tercakup pusat atau inti dari pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran yang kemudian menjadikan wilayah

Pangandaran dapat atau mampu untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom. Disamping itu kecamatan Pangandaran merupakan kecamatan yang menaungi banyak kawasan wisata dan beragam daya tarik yang sebagian besar merupakan wisata alam, yang pengembangannya dapat dan sedang dilakukan dengan konsep atau pendekatan *ecotourism*. Di Provinsi Jawa Barat, kawasan wisata Pangandaran merupakan salah satu kawasan wisata yang utama dengan daya tarik utama adalah wisata alam, dan secara nasional juga sangat dikenali oleh masyarakat Indonesia.

Operasionalisasi konsep *ecotourism* yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan antara konsep *ecotourism* menurut TIES dengan prinsip keenam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Prinsip keenam menurut Permendagri No 33 tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

“... partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan”.

Dengan demikian prinsip *ecotourism* pada tingkat komunitas yang digunakan untuk pemenuhan prinsip-prinsip *ecotourism* pada tingkat komunitas di lokus penelitian, adalah prinsip *ecotourism* yang terdiri dari sembilan prinsip berikut: 1) Meminimumkan dampak fisik, sosial, perilaku dan psikologis; 2) Membangun kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan dan budaya; 3) memberikan pengalaman positif bagi wisatawan atau

tamu maupun masyarakat lokalnya; 4) menghasilkan atau memberikan keuntungan finansial langsung untuk upaya konservasi; 5) menghasilkan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal maupun swasta pelaku industri wisata; 6) memberikan pengalaman interpretatif yang berkesan bagi wisatawan (termasuk pengalaman edukatif), yang membantu meningkatkan sensitivitas bagi politik negara lokasi ekowisata, maupun lingkungan dan iklim sosialnya; 7) merancang, dan mengkonstruksi atau membangun, serta mengoperasikan fasilitas yang memiliki dampak rendah terhadap lingkungan dan masyarakat lokal; 8) memberikan pengakuan terhadap hak dan kepercayaan spiritual dari masyarakat asli dan dilakukan partnersip dalam pemberdayaan masyarakat lokal; dan 9) **partisipasi masyarakat** dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan: 1) wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara berbasis pada 9 prinsip ecotourism menurut TIES dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah; 2) observasi yang dilakukan pada tempat dan perilaku (aktivitas) pelaku wisata terutama komunitas pada penerapan prinsip-prinsip wisata; serta 3) dokumentasi pada berbagai foto, catatan-catatan pribadi, maupun dokumentasi perkembangan kawasan pada Kantor Kecamatan dan SKPD Kabupaten yang mengurus masalah kepariwisataan.

Informan dipilih dari beberapa kelompok berikut: 1) dari tokoh-tokoh

masyarakat baik formal maupun informal yang mengetahui sejarah perkembangan kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran (jumlah informan paling tidak 1 orang untuk tiap jenis komunitas dipilih secara purposive dari ketua komunitas atau anggota komunitas yang sangat senior dalam komunitas dan mengetahui sebagian besar sejarah komunitas sampai dengan apa yang dilakukan komunitas dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan wisata dengan konsep ecotourism di Kecamatan Pangandaran); 2) aparat pemerintah: 3) pengunjung di kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran, yang dipilih secara acak, tetapi mewakili golongan dewasa tua (di atas 50 tahun), dari golongan dewasa muda (antara 25-50 tahun) dan golongan belum dewasa (antara 15-25 tahun). Dari semua golongan tersebut dipilih paling tidak satu orang dari yang pendidikannya tinggi (mengenyam pendidikan di perguruan tinggi) dan yang tidak berpendidikan tinggi.

Teknik analisis data yang dilakukan untuk pengungkapan pemenuhan prinsip-prinsip ecotourism, maupun untuk pengungkapan hambatan dalam pengembangan ecotourism di kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran, adalah teknik analisis triangulasi sumber data dan teknik analisis triangulasi teknik pengumpulan data.

## HASIL PENELITIAN

Penerapan prinsip-prinsip ecotourism pada tingkat kawasan di kawasan wisata Pangandaran, dideskripsikan berdasarkan operasionalisasi konsep yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mencakup 9 prinsip yang merupakan gabungan dari konsep ecotourism menurut TIES (2015) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Deskripsi atas penerapan masing-masing prinsip ecotourism tersebut, sebagaimana uraian berikut.

**1. Penerapan Prinsip “Meminimumkan Dampak Fisik, Sosial, Perilaku Dan Psikologis”**

Dengan memperhatikan hasil wawancara baik dari Pemda, dan pedagang (kios dan asongan) dapat dilihat bahwa hanya pedagang kios/lapak saja yang menghawatirkan adanya dampak terhadap mereka

setelah adanya upaya penataan fisik lingkungan perdagangan dan jasa mereka seperti yajng dilakukan pada lokasi di dekat Taman Pangandaran yang berada di ujung jalan masuk utama kawasan pantai barat Pangandaran. Sedangkan pelaku lainnya tidak merasakan adanya dampak negatif tersebut. Dari hasil observasi dan dokumentasi juga tidak menunjukkan adanya dampak negatif tersebut. Memang ada keterbatasan anggaran dan SDM yang dialami oleh Pemda dalam upaya meminimumkan dampak ini.

**Tabel 1** Ringkasan Penerapan Prinsip Ecotourism “Meminimumkan Dampak Fisik, Sosial, Perilaku Dan Psikologis”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan data
Wawancara (Pemda, Humas F K P W P , pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Pemda sudah berusaha meminimumkan dampak fisik, sosial, ekonomi dalam pengembangan kawasan.</li> <li>• Bagi pedagang kios/lapak kurang terasa, atau relatif menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi mereka terutama dampak dari penataan fisik lokasi dagang mereka.</li> <li>• Bagi pedagang lapak, tidak terlalu terasa dampaknya.</li> </ul>	Penerapan prinsip “Meminimumkan Dampak Fisik, Sosial, Perilaku Dan Psikologis” dilakukan oleh Pemda, namun terdapat keterbatasan terkait dengan anggaran dan SDM.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan pedagang kios/lapak oleh Pemkab di sekitar Taman Pangandaran, telah berupaya untuk meminimumkan dampak fisik bagi semua stakeholder kegiatan wisata di Pangandaran.</li> <li>• Penataan juga telah dapat memberikan lingkungan fisik yang lebih baik kepada wisatawan maupun bagi pedagang kios/lapak (lebih sehat, lebih terang, lebih bersih, lebih terbuka, lebih baik kualitas bangunan walau tetap semi permanen, dan lebih indah)</li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran pemda terbatas, sehingga upaya meminimumkan dampak dengan upaya penyadaran dan sosialisasi sering tidak dapat dilakukan.</li> <li>• Begitu juga keterbatasan SDM di lingkungan Dinas dalam pelaksanaannya.</li> </ul>	

**2. Penerapan Prinsip “Membangun Kesadaran Dan Penghargaan Terhadap Lingkungan Dan Budaya”**

Pengembangan dan penataan kawasan wisata Pangandaran yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pangandaran telah mengajak masyarakat, seperti pengumpulan sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, menjaga lingkungan tetap bersih dalam kegiatan “bebersih bersama” tiap hari jumat, maupun pengorganisasian pengumpulan sampah oleh petugas khusus. Terdapat juga kesadaran masyarakat untuk menjaga rusa yang berkeliaran untuk tidak diganggu

atau diburu. Namun keberadaan rusa yang berkeliaran ini kadang juga dirasakan agak mengganggu lingkungan, karena rusa-rusa tersebut dapat membongkar sampah yang ada pada tempat-tempat sampah maupun stock makanan yang tidak tertutup rapat pada kios pedagang. Sementara pihak pengelola Taman Nasional Pananjung terlalu membiarkan rusa-rusa tersebut berkeliaran di luar habitatnya. Sementara itu banyak juga penyedia jasa kuda sering tidak disiplin dengan tidak memakaikan celana kuda pada kuda yang disewakan untuk ditunggangi pengunjung. Hal ini berpotensi mengotori pantai Pangandaran.

**Tabel 2** Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Membangun Kesadaran Dan Penghargaan Terhadap Lingkungan Dan Budaya”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan Bebersih bersama tiap jumat dilakukan rutin</li> <li>• Rusa tidak diburu, namun sering terlihat kotor</li> <li>• Balai TN Pananjung membiarkan rusa keluar dari TN</li> <li>• Pedagang asongan juga terlibat dalam kegiatan bebersih lingkungan tiap jumat</li> </ul>	Penerapan prinsip “Membangun Kesadaran Dan Penghargaan Terhadap Lingkungan Dan Budaya” dalam pengembangan ecotourism di kawasan wisata Pangandaran sudah dilakukan oleh Pemda bersama pelaku wisata lain, namun Pihak Balai Pengelola TN Pananjung kurang mendukung. Dan penyedia jasa kuda juga masih banyak kurang disiplin dalam pemakaian celana kuda sehingga berpotensi mengotori pantai.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keberadaan tempat sampah cukup membuat lingkungan di sekitar lokasi pedagang kios menjadi lebih baik,</li> <li>• kuda-kuda di sekitar bibir pantai, terlihat banyak yang tidak memakai celana kuda yang dapat mengotori pantai.</li> <li>• keberadaan rusa yang berkeliaran juga seringkali berada di jalan-jalan lingkungan, kadang membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor maupun wisatawan yang menikmati mobil kayuh.</li> <li>• kondisi rusa-rusa banyak dalam kondisi kurang sehat, juga kurang sedap dipandang mata bagi wisatawan.</li> </ul>	
Dokumentasi	Tidak ada dokumen yang menerangkan penerapan prinsip ini	

**3. Penerapan Prinsip “Memberikan Pengalaman Positif Bagi Wisatawan Atau Tamu Maupun Masyarakat Lokalnya”**

Dari berbagai wawancara yang dilakukan baik terhadap pedagang kios/lapak, terutama kios/lapak yang menyediakan penyewaan sepeda, sepeda motor, dan mobil kayuh, mereka merasa bahwa apa yang mereka usahakan sudah merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman positif kepada wisatawan. Pengalaman positif sebagaimana yang dirasakan oleh wisatawan, dirasakan berbeda-beda oleh penduduk lokal. Salah satu informan yang merupakan pedangan di sektor yang telah terkena penataan dekat lokasi taman Pangandaran mengatakan bahwa dia merasa dari hasil penataan kios-kios mereka, sekarang lingkungan tempat berdagang mereka secara fisik menjadi lebih lapang, terang, dan indah. Namun jumlah pengunjung mereka

merasakan agak lebih sepi, walau mereka juga mengakui kalau sepihnya pengunjung mungkin bukan karena hasil penataan, tetapi secara umum kondisi ekonomi masyarakat juga sedang kurang baik.

Dari observasi lapangan yang dilakukan juga terlihat bahwa para wisatawan dalam menikmati moda yang disewakan para penyewa juga bahagia, dan tidak terlihat dan terdengar tawar menawar harga sewanya. Hanya terlihat dan terdengar wisatawan menyanyakan harga saja dan kemudian langsung memilih moda / wahana yang hendak digunakan atau dinikmati. Wisatawan yang menyewa moda/wahana selancar maupun moda transportasi sewaan (sepeda, sepeda elektrik dan mobil kayuh), yang rata-rata wisatawan kelompok atau keluarga, juga terlihat mendapatkan pengalaman yang menyenangkan atau positif.

**Tabel 3** Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Memberikan Pengalaman Positif Bagi Wisatawan Atau Tamu Maupun Masyarakat Lokalnya”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	Banyak pengalaman positif yang dirasakan oleh wisatawan yang wahananya disediakan oleh penduduk lokal Pengalaman yang dirasakan oleh penduduk lokal berbeda-beda. Ada yang merasa dari hasil penataan kios-kios mereka, sekarang lingkungan tempat berdagang mereka secara fisik menjadi lebih lapang, terang, dan indah. Namun dari sisi pengunjung mereka merasakan agak sepi	Penerapan prinsip “ <b>M e m b e r i k a n Pengalaman Positif Bagi Wisatawan Atau Tamu Maupun M a s y a r a k a t Lokalnya</b> ” sudah dilakukan oleh komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran. Namun yang dirasakan oleh penduduk lokal sebagai penyedia berbagai wahana yang memberikan pengalaman positif bagi wisatawan tersebut, berbeda-beda.
Observasi	terlihat bahwa para wisatawan dalam menikmati moda yang disewakan para penyewa juga bahagia, dan tidak terlihat dan terdengar tawar menawar harga sewanya harga yang ditawarkan oleh penduduk lokal pada wisatawan memang tidak terlalu tinggi (terjangkau)	
Dokumentasi	Tidak ada dokumen yang menerangkan penerapan prinsip ini	

**4. Penerapan Prinsip “Menghasilkan atau Memberikan Keuntungan Finansial Langsung Untuk Upaya Konservasi”**

Dari penataan fisik yang dilakukan di sekitar Taman Pangandaran (yang terletak di ujung jalan masuk utama Kawasan pantai barat Pangandaran), dampak yang dirasakan pada level komunitas pendapatannya sementara pada masa setelah penataan, masih menunjukkan kondisi pendapatan yang menurun. Walaupun tidak semua pedagang merasakan demikian, tetapi sebagian besar masih merasakan demikian. Sementara dari pedagang yang belum mengalami penataan, dengan adanya peningkatan upaya kebersihan kawasan bersama komunitas, maka kondisi lingkungan fisik di lokasi dagang dan jasa mereka menunjukkan pengaruh positif pada hasil perdagangan dan jasa mereka. Dari jumlah pedagang dan penjual jasa yang ada di kawasan wisata Pangandaran, lebih

banyak jumlahnya yang merasa meningkat pendapatannya setelah lingkungan mereka bersih.

Dengan kondisi pendapatan pada pedagang atau penjual jasa lebih banyak yang meningkat jika kawasan bersih, maka usaha penjagaan lingkungan kawasan wisata (bagian dari ecotourism pada level komunitas), maka apa yang telah dilakukan pada level komunitas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan kawasan wisata Pangandaran dapat dikatakan memiliki pengaruh pada peningkatan finansial secara langsung. Dan bila sebagian besar pedagang atau penjual jasa di kawasan wisata Pangandaran meningkat pendapatannya, maka dana yang dapat atau mampu mereka sisihkan untuk menjaga lingkungan juga lebih tinggi. Misalkan untuk membayar uang kebersihan maupun untuk menghiasi tempat dagang mereka menjadi tampak lebih menarik.

**Tabel 4** Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Menghasilkan Atau Memberikan Keuntungan Finansial Langsung Untuk Upaya Konservasi”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan lokasi dagang kios, dirasakan sebagian besar pedagang yang terkena penataan sebagai sesuatu yang berdampak kurang menyenangkan</li> <li>• Sebagian besar pedagang lainnya merasakan pendapatan yang meningkat setelah adanya penataan di salah satu bagian kawasan wisata Pangandaran</li> <li>• Dengan peningkatan pendapatannya para pedagang menjadi lebih mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menjaga lingkungannya</li> </ul>	Penerapan prinsip “Menghasilkan Atau Memberikan Keuntungan Finansial Langsung Untuk Upaya Konservasi” dalam p e n g e m b a n g a n ecotourism di kawasan wisata Pangandaran sudah terjadi dan dirasakan oleh komunitas pedagang kios maupun pelaku wisata lainnya dalam tingkat yang sedang.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlihat kebersihan yang lebih baik di lingkungan kawasan wisata dibanding pengamatan peneliti pada tahun-tahun sebelumnya.</li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dokumen yang menerangkan penerapan prinsip ini</li> </ul>	

**5. Penerapan Prinsip “Menciptakan Keuntungan Finansial Baik Bagi Masyarakat Lokal Maupun Swasta Pelaku Industri Wisata”**

Dari gambaran tentang pengembangan kawasan wisata Pangandaran yang memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan, juga dapat dilihat terjadinya peningkatan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan swasta pelaku industri wisata di Kawasan Wisata Pangandaran. Oleh karena itu penerapan prinsip ini dapat dinyatakan telah terjadi pada level komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran seiring dengan pelaksanaan prinsip sebelumnya yaitu “menciptakan keuntungan finansial bagi upaya konservasi”.

Pembangunan taman yang telah dilakukan di ujung jalan masuk utama kawasan pantai barat Pangandaran, semakin menarik orang untuk berfoto-foto dan

melakukan kegiatan bersama di lokasi taman tersebut, selain mandi dan berwisata air di laut Pangandaran. Keindahan taman juga telah menarik wisatawan untuk datang ke Pangandaran. Hotel yang dibangun semakin baik pada semua sektor di kawasan wisata Pangandaran juga mempermudah wisatawan dalam mencari tempat akomodasi dalam berwisata di Pangandaran. Beberapa hotel yang dibangun dengan konsep mitigasi terhadap bencana alam tsunami (misal Hotel Laut Biru), memberikan peningkatan rasa aman kepada wisatawan yang akan menginap. Hal ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata Pangandaran.

Keterpaduan wisata pantai di Pangandaran dengan Taman Nasional Pananjung yang memiliki fungsi konservasi bagi satwa dan flora di kawasan Pananjung yang bersebelahan dengan lokasi kawasan

**Tabel 5** Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Menciptakan Keuntungan Finansial Baik Bagi Masyarakat Lokal Maupun Swasta Pelaku Industri Wisata”

T e k n i k Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari penataan lokasi dagang kios/lapak yang dilakukan, dirasakan sebagian besar pedagang yang terkena penataan sebagai sesuatu yang berdampak kurang menyenangkan</li> <li>Sementara sebagian besar pedagang lainnya merasakan pendapatan yang meningkat setelah adanya penataan di salah satu bagian kawasan wisata Pangandaran</li> <li>Secara umum terjadi peningkatan pendapatan pada sebagian besar pelaku wisata di kawasan Pangandaran dengan adanya penataan taman Pangandaran dengan konsep ecotourism yang telah dilakukan dan difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Pangandaran.</li> </ul>	Penerapan prinsip “Menciptakan <u>Keuntungan Finansial</u> Baik Bagi <u>Masyarakat Lokal</u> Maupun <u>Swasta Pelaku Industri</u> Wisata” dalam pengembangan ecotourism di kawasan wisata Pangandaran telah terjadi pada level komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran seiring dengan pelaksanaan prinsip sebelumnya yaitu “menciptakan keuntungan finansial bagi upaya konservasi”.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlihat kebersihan yang lebih baik di lingkungan kawasan wisata dibanding pengamatan peneliti pada tahun-tahun sebelumnya.</li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada dokumen yang menerangkan penerapan prinsip ini</li> </ul>	

wisata pantai Pangandaran (di pantai barat maupun timur), juga menjadi bukti bahwa pengembangan kawasan wisata Pangandaran dilakukan dengan menggunakan konsep ecotourism. Begitu juga upaya menjaga kebersihan lokasi dagang dan kawasan pantai Pangandaran, juga merupakan upaya *ecotourism* yang melibatkan komunitas. Dan upaya-upaya lain yang juga banyak dilakukan oleh komunitas yang terkait dengan ecotourism.

**6. Penerapan Prinsip “Memberikan Pengalaman Interpretatif (Termasuk Edukatif) yang Berkesan bagi Wisatawan”**

Di kawasan wisata Pangandaran telah terdapat banyak wahana yang disediakan oleh banyak komunitas yang dapat digolongkan pada wahana yang dapat memberikan pengalaman interpretatif yang berkesan bagi wisatawan. Diantara wahana-wahana tersebut, adalah: 1) wahana penyewaan perahu untuk ke pasir putih dan melihat taman laut; 2) wahana

penyewaan sepeda, sepeda motor, sepeda elektrik, dan mobil kayuh; 3) wahana jasa penyewaan kuda tunggang; 4) wahana jasa penyewaan matras selancar dan ban atau pelampung; 5) wahana jasa penyewaan banana boat di pantai timur; 6) wahana water boom di hotel Laut Biru; dan 7) wahana pelestarian alam dan marga satwa di Taman Nasional Pananjung. Semua wahana-wahana tersebut di atas, sebagian besar (6 dari 7 wahana) penyediaannya dilakukan oleh komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran. Hanya wahana pelestarian alam dan marga satwa di Taman Nasional Pananjung yang penyediaannya dilakukan oleh Pemerintah. Dari wahana yang tersedia tersebut juga termasuk dalam kategori wahana yang rekreatif maupun edukatif. Tetapi yang sangat bersifat edukatif, adalah yang wahana pelestarian alam dan margasatwa yang disediakan oleh Taman Nasional Pananjung.

Tabel 6 Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Menciptakan Keuntungan Finansial Baik Bagi Masyarakat Lokal Maupun Swasta Pelaku Industri Wisata”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Wawancara (Pemda, Humas FKPPW, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari penataan lokasi dagang kios/lapak yang dilakukan, dirasakan sebagian besar pedagang yang terkena penataan sebagai sesuatu yang berdampak kurang menyenangkan</li> <li>• Sebagian besar pedagang lainnya merasakan pendapatan yang meningkat setelah adanya penataan di salah satu bagian kawasan wisata Pangandaran</li> <li>• Secara umum terjadi peningkatan pendapatan pada sebagian besar pelaku wisata di kawasan Pangandaran dengan adanya penataan taman Pangandaran dengan konsep ecotourism yang telah dilakukan dan difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Pangandaran.</li> </ul>	Penerapan prinsip ecotourism “Memberikan Pengalaman Interpretatif (Termasuk Edukatif) Yang Berkesan Bagi Wisatawan “ telah terjadi atau diterapkan di Kawasan wisata Pangandaran. Dan pelaku penyediaannya sebagian besar oleh komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlihat kebersihan yang lebih baik di lingkungan kawasan wisata dibanding pengamatan peneliti pada tahun-tahun sebelumnya.</li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dokumen yang menerangkan penerapan prinsip ini</li> </ul>	

**7. Penerapan Prinsip “Merancang, Dan Mengkontruksi Atau Membangun, Serta Mengoperasikan Fasilitas Dengan Dampak Rendah Pada Lingkungan Dan Masyarakat Lokal”**

Dari wawancara terhadap banyak pedagang kios/lapak di kawasan wisata Pangandaran, dapat terlihat bahwa prinsip “Merancang, dan Mengkontruksi atau Membangun, Serta Mengoperasikan Fasilitas Dengan Dampak Rendah Pada Lingkungan Dan Masyarakat Lokal”, telah dilakukan pada level komunitas dengan baik, karena berbagai fasilitas umum yang disediakan semuanya telah memberikan dampak yang positif (dampak negatifnya rendah). Begitu juga dari hasil observasi yang dilakukan juga menunjukkan hasil yang mendukung bahwa dampak

negatifnya relatif minim.

Keberadaan Fasilitas Publik dengan dampak negatif yang minim diantaranya berupa taman Pangandaran yang berada pada ujung jalan masuk pantai barat Pangandaran, dan penanda Pantai Timur Pangandaran yang dapat dipergunakan sebagai arena berfoto oleh para wisatawan, dan wahana skate board dan sepeda free style di sebelah barat daya pantai barat Pangandaran. Pos Jaga Pantai maupun tempat bilas yang diperuntukkan bagi umum juga merupakan fasilitas publik. Semua fasilitas publik yang ada di kawasan wisata Pangandaran, semuanya dirancang, dibangun dan dioperasikan dengan tidak memberikan dampak negatif. Hal ini disampaikan oleh semua informan yang diwawancarai.

Tabel 7 Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Merancang, Dan Mengkontruksi Atau Membangun, Serta Mengoperasikan Fasilitas Dengan Dampak Rendah Pada Lingkungan Dan Masyarakat Lokal”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari wawancara terhadap banyak pedagang kios/lapak di kawasan wisata Pangandaran, dapat terlihat bahwa prinsip “Merancang, Dan Mengkontruksi Atau Membangun, Serta Mengoperasikan Fasilitas Dengan Dampak Negatif Pada Lingkungan Dan Masyarakat Lokal”, telah dilakukan pada level komunitas dengan baik, Karena berbagai fasilitas umum yang disediakan semuanya telah memberikan dampak yang positif (dampak negatifnya rendah).</li> </ul>	Penerapan prinsip “Merancang, Dan Mengkontruksi Atau Membangun, Serta Mengoperasikan Fasilitas Dengan Dampak Negatif Pada Lingkungan Dan Masyarakat Lokal“ di kawasan wisata Pangandaran telah dilakukan dengan cukup baik.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>observasi yang dilakukan juga menunjukkan hasil yang mendukung bahwa dampak negatifnya relatif minim.</b></li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada dokumen yang menerangkan penerapan prinsip ini</li> </ul>	

**8. Penerapan Prinsip “Memberikan Pengakuan Terhadap Hak Dan Kepercayaan Spiritual Dari Masyarakat Asli Dan Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Lokal”**

Dari wawancara yang dilakukan terhadap semua informan, didapat informasi bahwa tidak ada perlakuan dan treatment khusus terhadap masyarakat lokal di Kawasan Pangandaran. karena kepercayaan masyarakat lokal di kawasan Pangandaran bukan merupakan kepercayaan yang khas yang berbeda dari kebanyakan di kawasan yang lebih luas. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat

lokal di kawasan Pangandaran, sebagian besar merupakan masyarakat beragama Islam sebagaimana yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Pangandaran maupun di Provinsi Jawa Barat dan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil obserasi juga memperlihatkan bahwa upaya pemberdayaan telah dilakukan oleh Pemda pada komunitas lokal terutama pada aspek bina lingkungan. Hasil dokumentasi juga menunjukkan adanya upaya pemberdayaan masyarakat lokal, walaupun masih sangat terbatas karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Tabel 8 Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Memberikan Pengakuan Terhadap Hak Dan Kepercayaan Spiritual Dari Masyarakat Asli Dan Dilakukan Partnersip Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perlakuan dan treatment khusus terhadap masyarakat lokal di Kawasan Pangandaran. karena kepercayaan masyarakat lokal di kawasan Pangandaran bukan merupakan kepercayaan yang khas yang berbeda dari kebanyakan di kawasan yang lebih luas</li> </ul>	Penerapan prinsip “Memberikan Pengakuan Terhadap Hak Dan Kepercayaan Spiritual Dari Masyarakat Asli Dan Dilakukan Partnersip Atau Kerjasama Dengan Masyarakat Lokal Untuk Memberdayakan Mereka “ ini di kawasan wisata Pangandaran telah dilakukan dengan cukup baik (kategori sedang).
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya pemberdayaan kepada masyarakat dapat terlihat telah dilakukan terutama pada bina lingkungannya, yang telah dilaksanakan dengan cukup baik (sedang).</li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari dokumen terkait dengan upaya penataan lingkungan yang dilaksanakan, dapat dilihat upaya pemberdayaan kepada komunitas pelaku wisata, telah dilakukan dengan cukup baik. Ada keterbatasan anggaran Pemda Kabupaten Pangandaran, sementara kemampuan finansial komunitas untuk melakukannya secara mandiri juga masih kurang.</li> </ul>	

**9. Penerapan Prinsip “Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan, Dan Pengendalian Ekowisata Dengan Menghormati Nilai-Nilai Sosial-Budaya Dan Keagamaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan”.**

Secara umum dalam kegiatan perencanaan kawasan wisata di Pangandaran, pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran sudah dilibatkan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan ecotourism di kawasan Wisata Pangandaran, tidak dirasakan keterlibatannya oleh komunitas, tetapi dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang pasti melakukan Musrenbang mulai Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten, di dalamnya pasti akan selalu ada keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam perencanaan ecotourism pada tingkat kabupaten, komunitas atau perwakilan komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran belum tentu dilibatkan. Kalaupun ikut dalam Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan, seringkali para pedagang tidak mau menjadi perwakilan dalam Musrenbang Kabupaten, karena akan menyita waktu kerja mereka cukup banyak (intisari dari wawancara ada komunitas pelaku wisata). Tetapi karena pada level desa sampai kecamatan, dalam kegiatan Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan, perwakilan komunitas pelaku wisata Pangandaran pasti terlibat perwakilannya.

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan wisata terkait dengan penataan pedagang di kawasan wisata menuju terwujudnya ecotourism, komunitas pelaku wisata di kawasan wisata

Pangandaran sudah dilibatkan. Seperti pada penataan kios/lapak pedagang yang berlokasi di sebelah Taman Pangandaran (yang berada di ujung jalan masuk utama pantai barat Pangandaran), dalam pelaksanaannya juga sudah melibatkan komunitas. Dalam pemanfaatan ruang ini, keterlibatan komunitas dalam mempercantik kios/lapak selama ini sudah dilakukan oleh masing-masing pedagang kios/lapak. Namun seringkali keterbatasan modal untuk melakukan penataan secara mandiri menjadi hambatan dalam melakukan upaya mempercantik kios/lapak. Dan kadang diantara pedagang sulit adanya kebersamaan untuk membangun tema dalam upaya mempercantik lokasi dagangnya. Walau diantara mereka terdapat pemimpin-pemimpin kelompok, tetapi dalam upaya mempercantik lokasi dagang bersama, kepemimpinan yang ada belum dapat memerankan kepemimpinannya dengan baik. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Pangandaran, komunitas pelaku wisata Pangandaran telah terlibat.

Dalam kegiatan pengendalian kawasan wisata Pangandaran, komunitas pelaku wisata juga sudah dilibatkan. Diantara keterlibatan komunitas dalam pengendalian kawasan wisata di Pangandaran adalah dalam kegiatan bebersih lingkungan pada hari Jumat yang melibatkan semua pedagang kios/lapak dan pedagang asongan untuk membersihkan lingkungan kios/lapak dan kawasan pantai di sekitar kiosnya masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh koordinator kelompok pedagang kios/lapak pada masing-masing sektor. Disamping itu komunitas pedagang/

kios juga berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan menampung dan mengumpulkan sampah pada tempatnya yang kemudian akan diangkut oleh petugas sampah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini para pedagang kios/lapak melakukan pembayaran retribusi

sampahnya. Namun keberadaan rusa-rusa dari Taman Nasional Pananjung yang berkeliaran bebas di sekitar kios/lapak dagang mereka, kadang dirasakan mengganggu, terutama bagi pedagang yang memiliki dagangan yang dapat dimakan oleh rusa-rusa tersebut.

Tabel 9 Ringkasan Penilaian Penerapan Prinsip Ecotourism “Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan, Dan Pengendalian Ekowisata Dengan Menghormati Nilai-Nilai Sosial-Budaya Dan Keagamaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan”

Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Ringkas	Ringkasan hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan data
Wawancara (Pemda, Humas FKPWP, pedagang kios/lapak, pedagang asongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan ecotourism di kawasan Wisata Pangandaran, tidak dirasakan keterlibatannya oleh komunitas.</li> </ul>	Penerapan prinsip “Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan, Dan Pengendalian Ekowisata Dengan Menghormati Nilai-Nilai Sosial-Budaya Dan Keagamaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan” ini secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam kegiatan perencanaan kawasan wisata di Pangandaran, pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran juga sudah dilibatkan.
Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada tempat maupun peristiwa yang dapat diobservasi saat penelitian dilakukan</li> </ul>	
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari ketentuan dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dan di daerah yang pasti melakukan Musrenbang mulai Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten, di dalamnya pasti akan selalu ada keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam perencanaan ecotourism pada tingkat kabupaten, komunitas atau perwakilan komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran belum tentu dilibatkan.</li> </ul>	

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian pada penerapan ke-9 (sembilan) prinsip dalam *ecotourism* pada tingkat komunitas, dapat dilihat bahwa penerapan konsep *ecotourism* pada level komunitas dalam pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran, telah dilakukan dalam kategori cukup (sedang), dimana yang dirasakan oleh komunitas setempat relatif beragam tetapi secara umum dapat dikatakan telah dilakukan sedangkan bagi wisatawan

telah terasa penerapannya dengan baik. Kecenderungan penerapannya dari waktu ke waktu adalah ke arah yang lebih baik.

Penerapan prinsip *ecotourism* yang paling baik dilakukan di kawasan wisata Pangandaran adalah penerapan prinsip “Menciptakan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal maupun swasta pelaku industri wisata”, karena pada kawasan wisata yang sedang berkembang dan komunitas pelakunya masih belum berdaya, prinsip penciptaan

keuntungan finansial ini menjadi lebih utama dibanding dengan prinsip lainnya bagi komunitas. Sedangkan prinsip nomor 6 yaitu “Memberikan pengalaman interpretatif yang berkesan bagi wisatawan, yang membantu meningkatkan sensitivitas

bagi politik negara lokasi ekowisata, maupun lingkungan”, terutama yang terkait dengan peningkatan sensitivitas bagi politik negara, merupakan prinsip yang paling tidak banyak terwujud.

**Tabel 10** Ringkasan Penerapan 9 (sembilan) Prinsip *Ecotourism* pada Pengembangan Kawasan Wisata di Kecamatan Pangandaran

No	Prinsip Ecotourism (TIES 2015 dan Permendagri 33/2009)	Sub Kesimpulan Penerapan Semua Prinsip	Analisis dan Kesimpulan
1	Meminimumkan dampak fisik, sosial, perilaku dan psikologis	Penerapan prinsip ini dapat dinyatakan telah dapat dilakukan dengan cukup baik, walau terdapat keterbatasan Pemda dalam anggaran dan SDM dalam penerapannya	Dari berbagai penerapan dari 9 (sembilan) prinsip dalam ecotourism, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep ecotourism pada level komunitas dalam pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran ini, telah dilakukan dalam kategori cukup (sedang), dimana yang dirasakan oleh komunitas setempat relatif beragam tetapi secara umum dapat dikatakan telah dilakukan dan bagi wisatawan telah terasa penerapannya dengan baik. Oleh karena itu secara umum dapat dinyatakan penerapannya sudah terjadi atau dilakukan pada ke-9 prinsip ecotourism dalam kategori cukup (sedang) ke arah lebih baik.
2	Membangun kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan dan budaya	Prinsip ini telah berupaya dilakukan, dengan banyak kendala terutama pendanaan dan hasilnya secara keseluruhan masih dapat dikategorikan <b>cukup</b> .	
3	Memberikan pengalaman positif bagi wisatawan atau tamu maupun masyarakat lokalnya	penerapan prinsip ini dapat <b>dinvatakan telah dilakukan</b> , namun lebih kepada wisatawan, sedangkan bagi penduduk lokal masih samar pengalaman positifnya.	
4	Menghasilkan atau memberikan <u>keuntungan finansial langsung</u> untuk upaya konservasi	Penerapan prinsip ini sudah dirasakan oleh komunitas pedagang kios maupun pelaku wisata lainnya dalam tingkat yang sedang karena sebagian merasa kurang mendukung, tetapi sebagian besar menyatakan terjadi peningkatan pendapatan dan berpengaruh pada upaya peningkatan lingkungan mereka.	
5	Menciptakan <u>keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal</u> maupun swasta pelaku industri wisata	Penerapan prinsip ini telah terjadi pada level komunitas pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran seiring dengan pelaksanaan prinsip sebelumnya yaitu “menciptakan keuntungan finansial bagi upaya konservasi”.	
6	Memberikan <u>pengalaman interpretatif yang berkesan</u> bagi wisatawan, yang membantu meningkatkan sensitivitas bagi politik negara lokasi ekowisata, maupun lingkungan	Penerapan prinsip ini telah diterapkan. Pelaku penyediaannya sebagian besar oleh komunitas pelaku wisata. Sebagian ada memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan yang meningkatkan sensitivitas pada lingkungan Namun tidak terkait dengan sensitivitas pada politik kenegaraan.	
7	Merancang, dan mengkontruksi atau membangun, serta mengoperasikan <u>fasilitas yang memiliki dampak rendah terhadap lingkungan</u> dan masyarakat lokal	Penerapan prinsip ini di kawasan wisata Pangandaran telah dilakukan dengan cukup baik.	
8	Memberikan <u>pengakuan terhadap hak dan kepercayaan</u> spiritual dari <u>masyarakat asli</u> dan dilakukan partnersip atau kerjasama dengan masyarakat lokal untuk memberdayakan mereka	penerapan prinsip ini di kawasan wisata Pangandaran telah dilakukan dengan cukup baik (kategori sedang). Terhadap kepercayaan asli tidak ada yang spesifik, namun pemberdayaan terhadap komunitas pelaku wisata di kawasan wisata, telah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.	
9	<u>partisipasi masyarakat</u> , yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan	Secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan kawasan wisata di Pangandaran, pelaku wisata di kawasan wisata Pangandaran juga sudah dilibatkan, walau kadang tidak disadari dan kadang dalam mekanisme perwakilan.	

Faktor pendanaan sering dinyatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas penerapan beberapa prinsip ecotourism. Pada faktor pendanaan ini, tercakup pendanaan di lingkungan pemerintah daerah, komunitas pelaku wisata, maupun stakeholder pendukung lainnya. Sedangkan faktor ini sangat mempengaruhi pada pembangunan kesadaran akan pengembangan kawasan wisata dengan konsep ecotourism.

Prinsip ecotourism yang terkait dengan pemberian pengalaman interpretatif yang meningkatkan sensitivitas bagi politik negara dan lingkungan (pinsip ke-6 menurut TIES 2015) merupakan prinsip yang paling kurang diterapkan dalam kawasan yang menjadi lokus penelitian (kawasan wisata Pangandaran). Prinsip ini juga agak terlalu jauh dalam mengkategorikan antara pengembangan wisata yang menerapkan konsep ecotourism dengan yang bukan ecotourism, dengan menkaitkannya pada pengaruh pengembangan wisata pada politik negara. Sedangkan prinsip partisipasi yang menurut TIES (2015) tidak dicantumkan tetapi menurut Permendagri no 33 tahun 2009, menurut peneliti malah memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan pengembangan kawasan wisata yang menggunakan konsep ecotourism, sehingga cukup fair apabila prinsip partisipasi ini dimasukkan dalam prinsip pengembangan kawasan wisata yang menggunakan konsep *ecotourism*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penerapan dari 9 (sembilan) prinsip dalam konsep ecotourism pada level komunitas dalam pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Pangandaran, telah dilakukan dalam kategori cukup (sedang), dimana yang dirasakan oleh komunitas

setempat relatif beragam tetapi secara umum dapat dikatakan telah dilakukan, sementara bagi wisatawan telah terasa penerapannya dengan baik. Oleh karena itu secara umum dapat dinyatakan penerapannya sudah terjadi atau dilakukan pada ke-9 prinsip ecotourism dalam kategori cukup (sedang) dan memiliki kecenderungan ke arah lebih baik. Prinsip *ecotourism* yang paling tinggi penerapannya adalah yang terkait dengan penciptaan keuntungan bagi masyarakat lokal / komunitas dan swasta pelaku wisata. Sedangkan prinsip yang paling kurang penerapannya adalah yang terkait dengan pengalaman interpretatif yang dapat meningkatkan sensitivitas bagi politik negara dan lingkungan. Bila dikaitkan dengan prinsip ecotourism menurut TIES (2015), prinsip ke-6 dari TIES (2015) yang mengkaitkan pengalaman interpretatif yang dapat meningkatkan sensitivitas bagi politik negara, memang terlalu jauh untuk menjadi prinsip dalam ecotourism, sehingga tidak banyak terwujud atau terlalu jauh keterkaitannya dengan kegiatan nyata pengembangan wisata berbasis ecotourism. Oleh karena itu secara teoritis, prinsip ini dapat dihilangkan dari prinsip ecotourism. Sedangkan prinsip partisipasi yang dicantumkan dalam Permendagri 33/2009 malah cukup fair untuk dimasukkan dalam prinsip ecotourism, terutama pada *community-based ecotourism*.

### Saran

Dari pembahasan yang dilakukan dan kesimpulan yang diambil dengan memperhatikan pelaksanaan penerapan prinsip ecotourism, kendala yang ada dan kaitannya dengan konsep teoretis, dapat dirumuskan beberapa saran berikut:

1. Pemda bersama-sama DPRD Kabupaten Pangandaran perlu mengalokasikan dana

- lebih tiap tahunnya untuk pengembangan ecotourism, khususnya yang lebih membangun pemahaman dan kesadaran akan ecotourism pada level komunitas
2. Dalam pengembangan kawasan wisata dengan konsep ecotourism, perlu dijaga keseimbangan antara manfaat yang diperoleh oleh wisatawan maupun komunitas / masyarakat lokal di dalam maupun sekitar kawasan wisata, sehingga lebih meningkatkan keberlanjutannya
  3. Membatasi konsep ecotourism ke-6 menurut TIES (2015) dengan tidak mengkaitkan sampai terjadinya peningkatan sensitivitas pada politik negara, tetapi cukup sampai sensitivitas pada lingkungan fisik dan sosial di sekitar lokasi kawasan wisata saja.
  4. Memasukkan prinsip partisipasi pada pengembangan kawasan wisata dengan pendekatan konsep ecotourism, karena terkait dengan keberlanjutan pengembangan kawasan wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1993), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Blaxter, Loraine dan Christina Hughes dan Malcolm Tnight, *How To Research: Seluk Beluk Melakukan Riset*, terjemahan edisi kedua, Pt. Indeks, Jakarta
- Booth, Wayne C., dan Gregory G. Colomb dan Joseph M. Williams, (1995), *The Craft of Research*, The University of Chicago Press, Chicago-London
- Creswell, John W. (2003), *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE
- R.N. Ghosh, M.A.B Siddique, and R. Gabbay (2003), *Tourism and Economic Development*, Ashgate Publishing Company, Burlington-USA
- Gulo, W., (2007), *Metodologi Penelitian*, cetakan kelima, Grasindo, Jakarta
- Mason, Peter (2010), *Tourism, Impacts, Planning and Management*, Elsevier, Burlington-USA
- Nasdian, Fredian Tonny, 2003, *Pengembangan Masyarakat*, Bagian Ilmu-Ilmu Sosial, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Departemen IlmuIlmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB, Bogor
- Neuman, W.Lawrence (2000), *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Needham Heights-USA, Allyn & Bacon, 2000
- Sugiyono (2010), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Wasidi dkk (-), *Strategi Pengembangan Ekowisata Karst Pada Obyek Wisata Air Terjun Sri Getuk Di Kabupaten Gunungkidul*
- Yin, Robert K. (edisi revisi terjemahan, 2009) *Studi Kasus: Desain & Metoda*. Jakarta: Rajawali Pers.

## Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

Lampiran Foto:



Gambar 1: Kondisi Lingkungan Perdagangan Setelah Penataan Yang Memberikan Pengalaman positif bagi Wisatawan dan Komunitas



Gambar 2: Jasa penyewaan Sarana Wisata Bagi Wisatawan yang Disedikan Komunitas



Gambar 3: Pemberdayaan Masyarakat Lokal Aspek Bina Lingkungan dan Bina Usaha